

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN
DANA BAGI HASIL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
PADA KAB./KOTA PROPINSI SUMATERA UTARA**

RIVA UBAR HARAHAP
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ABSTRACT

The purpose of this study is to identify and analyze whether General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) and Profit Sharing Fund (DBH) influence simultaneously and partially to Human Development Index (IPM).

The analytical method used is multiple regressions by doing classic assumption test method prior to gather the best model research. These variabel research such as the General Allocation Fund, Special Allocation Fund and Profit Sharing Fund are independent variables and Human Development Index is dependent variable. Research sample is 25 district/city in North Sumatera Province. DAU, DAK and DBH obtained from www.djpkd.depkeu.go.id. The data of Human Development Index obtained from Indonesia Statistics Centre Institution.

The results of this study concluded that the General Allocation Fund, Special Allocation Fund and Profit Sharing Fund influence simultaneously to the Human Development Index. The result consistent with research hypothesis. General Allocation Fund, Special Allocation Fund and Profit Sharing Fund have no effect partially to the Human Development Index. The result consistent with research hypothesis.

Keywords : General Allocation Fund, Special Allocation Funds, Profit Sharing Fund, the Human Development Index

I. Latar Belakang Masalah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun sebagai salah satu dari indikator alternatif, selain pendapatan nasional per kapita, untuk menilai keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia yang telah disusun, maka bisa ditetapkan tiga kelompok negara. Pertama, negara dengan tingkat pembangunan manusia yang rendah bila IPM-nya berkisar antara 0 sampai 0,5. Kedua, negara dengan tingkat pembangunan manusia sedang jika IPM-nya berkisar antara 0,51 sampai 0,79. Ketiga, negara dengan tingkat pembangunan manusia tinggi jika IPM-nya berkisar antara 0,80 sampai 1.

Jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran di Sumatera Utara yang masih tinggi, dinilai perlu untuk terus ditekan persentasenya pada 2011. Sebab, bila dua hal ini tidak segera ditangani, dampaknya bisa menyebabkan kerawanan sosial dan terjadinya instabilitas di tingkat lokal. Dari akhir Desember 2009 hingga April 2010, sebaran penduduk yang menganggur masih menumpuk di perkotaan, dan sebaran penduduk miskin masih tetap dominan di pedesaan. Dengan kondisi seperti ini, Sumut perlu melakukan tekanan terhadap kinerja untuk mengentaskan dua hal tersebut. Pembangunan di Indonesia pada daerah kabupaten dan kota sampai saat ini masih bergantung pada dana transfer dan pemerintah pusat. Kabupaten/kota baru berdiri yang berasal dari pemekaran pada awal pemerintahan bergantung kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Menurut Simanjuntak (2001) dalam Ndadari dan Adi (2008) walaupun otonomi sudah berjalan di tiap kabupaten dan kota namun pemerintah daerah belum sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat salah satunya dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Menurut Adi dan Ndadari (2008) permasalahan yang terjadi saat ini adalah pemerintah daerah terlalu menggantungkan alokasi DAU untuk membiayai belanja modal dan pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah.

Penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan variabel belanja pemerintah sedangkan penelitian ini menggunakan variabel dependen Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten/kota di Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh DAK, DAU, dan DBH baik secara simultan dan parsial terhadap indeks pembangunan manusia.

II. Uraian Teoritis

A. Dana Alokasi Umum

DAU adalah dana yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka desentralisasi. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menjelaskan bahwa DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk

mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

DAU suatu Daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa pemberian DAU kepada pemda merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemda. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemda, dan pemda secara leluasa dapat menggunakan DAU apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sehingga akan menciptakan hidup yang sehat dan harapan hidup lebih panjang, meningkatkan kualitas pendidikan dan standard kehidupan masyarakat.

B. Dana Alokasi Khusus

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menjelaskan bahwa DAK merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk menjalankan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di kabupaten/kota. DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. DAK sepenuhnya digunakan untuk belanja modal untuk peningkatan fasilitas publik dengan kata lain tidak ada bagian DAK yang digunakan untuk biaya operasional pembangunan seperti biaya perjalanan dinas dan sebagainya.

C. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam

rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA).

D. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. HDI digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Jika fasilitas publik dapat terpenuhi maka masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan efisien dan efektif sehingga pada akhirnya akan menciptakan hidup yang sehat dan harapan hidup lebih panjang, meningkatkan kualitas pendidikan dan standard kehidupan masyarakat.

III. Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan untuk menguji pengaruh DAU, DAK dan DBH terhadap IPM adalah sebagai berikut :

Keterangan :

Y	$= \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$
Y	= Indeks Pembangunan Manusia
X_1	= Dana Alokasi Umum
X_2	= Dana Alokasi Khusus
X_3	= Dana Bagi Hasil
a	= Konstanta
b_1, b_2, b_3	= Koefisien Variabel
e	= Error Term

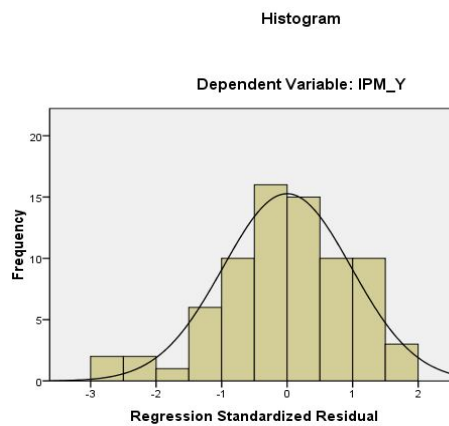
Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, dengan kriteria sampel yang dipilih adalah data DAU, DAK, DBH dan IPM yang lengkap dan pemekaran kab./kota dibawah tahun 2007. Data DAU, DAK, DBH merupakan data tahun 2005, 2006, 2007 sedangkan data IPM merupakan data tahun 2006, 2007,

2008. Dari kriteria sampel yang dipilih hanya 25 kabupaten/kota yang menjadi sampel.

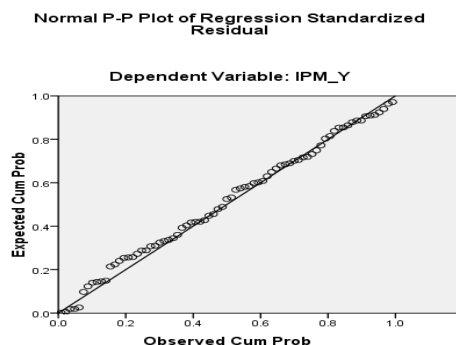
IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil pengujian normalitas data pada variabel DAU, DAK, DBH, dan IPM diperoleh hasil sebagai berikut :



Gambar 1. Histogram Uji Normalitas

Berdasarkan tampilan histogram dan kurva normal yang berbenruk lonceng maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan sudah berdistribusi normal. Analisa lebih lanjut dengan menggunakan *Normal Probability Plot of Regression Standardized Residual* dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2 Normal P - P Plot

Hasil pengujian menunjukkan bahwa data Residual terdistribusi secara normal dimana titik-titik disekitar garis diagonal dan penyebarannya masih mengikuti garis diagonal.

Berdasarkan koefisien korelasi antar variabel independen tidak ada yang melebihi 0,90 dengan demikian tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi. Hal ini menunjukkan tidak ada problem multiko dalam model regresi pada tabel 1.

Tabel 1.
Nilai Koefisien Korelasi

		Coefficient Correlations ^a			
Model		DBH_X3	DAK_X2	DAU_X1	
1	Correlations	DBH_X3	1.000	.620	-.838
		DAK_X2	.620	1.000	-.723
		DAU_X1	-.838	-.723	1.000
	Covariances	DBH_X3	1.641E-10	2.094E-10	-4.279E-11
		DAK_X2	2.094E-10	6.953E-10	-7.590E-11
		DAU_X1	-4.279E-11	-7.590E-11	1.587E-11

a. Dependent Variable: IPM_Y

Pengujian menggunakan VIF dan *Tolerance* menunjukkan bahwa tidak ada yang bernilai lebih dari 10 dan kurang dari 0,1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi yang terlihat pada tabel 2.

Tabel 2.
Nilai Tolerance dan VIF

		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	DAU_X1	.230	4.345
	DAK_X2	.477	2.096
	DBH_X3	.297	3.372

a. Dependent Variable: IPM_Y

Dari output SPSS nilai Durbin Watson 1,070 maka model ini terbebas dari asumsi klasik autokorelasi. Dari tabel 3. dapat dilihat bahwa DW di daerah No

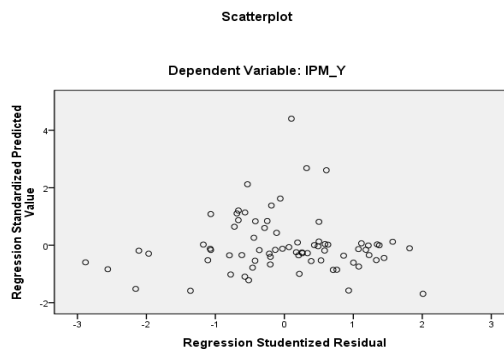
Autocorrelation. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linear terbebas dari Asumsi Klasik Statistik Autokorelasi.

Tabel.3
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b							
Change Statistics							
Model	R Square	Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	Durbin-Watson
1		.119	3.184	3	71	.029	1.070

b. Dependent Variable: IPM_Y

Dari gambar Output SPSS (Scatterplott) di atas bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka model regresi berganda tidak terdapat Heteroskedastisitas.



Gambar 3 Scatterplot

Koefisien determinasi dengan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,81 berarti variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen hanya sebesar 81%, sisanya sebesar 19% diterangkan oleh variabel lain di luar model yang terangkum dalam *error*. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa pada regresi dengan variabel independen DAU, DAK, dan DBH serta variabel dependen IPM Nilai *P Value* (sig) 0,029 lebih kecil dari 0,05 disimpulkan bahwa variabel independen (DAU, DAK, dan

DBH) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (IPM) pada taraf signifikansi $\alpha = 5\%$.

Tabel 4.
Nilai Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.344 ^a	.119	.081	2.59377

a. Predictors: (Constant), DBH_X3, DAK_X2, DAU_X1
b. Dependent Variable: IPM_Y

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa pada regresi dengan variabel independen DAU, DAK, dan DBH serta variabel dependen IPM disimpulkan bahwa DAU dan DBH berpengaruh secara positif dan signifikan pada $\alpha = 5\%$ terhadap IPM, artinya kenaikan DAU dan DBH akan menyebabkan kenaikan IPM. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa DAK berpengaruh secara negatif dan signifikan pada $\alpha = 5\%$ terhadap IPM, artinya kenaikan DAK akan menurunkan IPM. Model yang terbentuk dari hasil regresi adalah sebagai berikut: $Y = 72.005 + 4.306 X_1 - 4.304 X_2 + 6.345 X_3 + e$. Hasil dapat dilihat dari tabel 5.

Tabel 5.
Hasil Pengujian Hipotesa Uji F
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	64.257	3	21.419	3.184	.029 ^a
	Residual	477.661	71	6.728		
	Total	541.919	74			

a. Predictors: (Constant), DBH_X3, DAK_X2, DAU_X1
b. Dependent Variable: IPM_Y

Hasil pengujian membuktikan bahwa DAU secara parsial tidak berpengaruh terhadap IPM, karena pada dasarnya DAU lebih banyak digunakan untuk belanja umum pegawai bukan untuk infrastruktur dan fasilitas umum sehingga pengaruh terhadap IPM relatif sangat sedikit. Data penelitian ini menggunakan kabupaten/kota dan runtun waktu selama tiga tahun (data panel) dengan lokasi kabupaten/kota di

propinsi Sumatera Utara. Penelitian ini tidak memisahkan secara rinci seberapa besar DAU yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat selain itu porsi DAU untuk masing-masing kabupaten/kota juga berbeda-beda tergantung dari hasil penghitungan DAU yang ditentukan pemerintah pusat.

Hasil pengujian juga diperoleh hasil bahwa DAK secara parsial tidak berpengaruh terhadap IPM. Penelitian ini tidak memisahkan alokasi DAK perbidang seperti pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, air bersih, kelautan dan perikanan serta pertanian. Selain itu, pengalokasian DAK per bidang di tiap-tiap daerah berbeda-beda tergantung dari prioritas pembangunan nasional yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat bersama pemda. Peneliti tidak dapat mengetahui secara rinci sarana dan prasarana apa saja yang dibangun pemerintah yang menggunakan DAK dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat selain itu terdapat perbedaan DAK untuk masing-masing kabupaten/kota. Hal ini dapat dilihat dari hasil tabel 6.

Tabel 6.
Hasil Pengujian Hipotesa Uji T

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	72.005	.659		109.323	.000
	DAU_X1	4.306E-6	.000	.251	1.081	.283
	DAK_X2	-4.304E-5	.000	-.263	-1.632	.107
	DBH_X3	6.345E-6	.000	.101	.495	.622

a. Dependent Variable: IPM_Y

V. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan yang diperoleh penulis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa DAU, DAK dan DBH berpengaruh terhadap IPM.
2. Secara parsial DAU, DAK dan DBH tidak berpengaruh terhadap IPM. Hal ini sejalan dengan penelitian Budi Sinulingga (2007) bahwa sektor-sektor yang mempunyai pengaruh tinggi terhadap peningkatan IPM ialah sektor yang

mengurangi kesenjangan yaitu sektor perdagangan, tenaga kerja dan industri. Sedangkan Sektor-sektor infrastruktur memiliki pengaruh langsung relatif kecil terhadap peningkatan IPM.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang harus diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil analisis diatas, antara lain:

1. Keterbatasan penelitian ini yaitu data DAU, DAK, dan DBH yang digunakan belum terinci dengan baik. Hal ini disebabkan karena data tidak diperoleh secara lengkap serta rentang waktu yang pendek yaitu tahun 2005 - 2007. Data DAU yang digunakan tidak memisahkan bagian untuk pelayanan publik dengan bagian untuk pelaksanaan pemerintahan sehingga tidak diketahui secara rinci seberapa besar DAU yang dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat. Data DAK yang digunakan juga tidak memisahkan alokasi perbidang sehingga tidak diketahui bidang apa saja yang berperan dalam peningkatan IPM.
2. Penelitian menggunakan model regresi dengan *lag* setahun sehingga tidak dapat diketahui apakah DAU, DAK, dan DBH dalam jangka lebih panjang semakin berpengaruh dalam peningkatan IPM atau malah terjadi penurunan.

Saran

1. Penelitian berikutnya disarankan menggunakan data yang lebih lengkap dan rentang waktu yang lebih panjang sehingga besarnya pengaruh DAU, DAK, dan DBH terhadap IPM lebih teruji. Data DAK sebaiknya dilakukan pemisahan alokasi perbidang sehingga dapat diketahui mana saja yang memiliki peranan jangka pendek dan jangka panjang terhadap peningkatan IPM.
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan model regresi dengan *lag* lebih dari setahun sehingga dapat diketahui apakah DAU, DAK, dan DBH dalam jangka lebih panjang semakin berpengaruh dalam peningkatan IPM atau malah terjadi penurunan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah

Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Yogyakarta: *Jurnal Ekonomi STE1*No.2/Th. XIII/25/ April-Juni 2004: 90-109.

- Abimanyu, Anggito. 2005. *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih*. Bapekki Depkeu.
- Adi, Priyo Hari. 2006. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa Bali). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik* Volume 08, No. 01, February 2007. Page 1450 -1465.
- Departemen Keuangan. <http://www.djpk.depkeu.go.id/document.php/document/article/108/69/>
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makasar 26 - 28 Juli 2007*.
- Departemen Komunikasi dan Indormasi. 2008.Dana Alokasi Khusus Untuk Bantu Daerah Dalam Pembangunan.
http://balitbang.depkominfo.go.id/?mod=CLDEPTKMF_BRT01&view=l&id=BRT080212142301&mn=BRT0100%7CCLEPTKMF_BRT01
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2006. Sosialisasi Kebijakan dan Perhitungan Dana Perimbangan Tahun 2007. <http://www.perbendaharaan.go.id/perben/modul/kegiatan/index.php?id=1860>
- Erlina. 2008. Pengaruh Set Kesempatan Investasi terhadap Nilai Perusahaan : Peran Kebijakan Perusahaan dan Kepemilikan Manajerial. USU Press. Medan.
- Erlina dan Sri Mulyani. 2007. *Metodologi Penelitian untuk Akuntansi dan Manajemen*. USU Press. Medan.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hair, J.F., Anderson RE., Rolph, Tatham, R.L., dan Black, W.C. 1998. *Mutivariate Data Analysis*. 5th edition. Prentice-Hall Int.,Inc. NJ.
- Hariato, David dan Priyo Hari Adi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X. Unhas Makasar 26-28 Juli 2007*.
- Irawan, Ari. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat dan Belanja Modal terhadap Pendapatan Perkapita Masyarakat di Kabupaten/Kota se- Provinsi Sumatera Utara. Tesis S2 Program Pascasarjana USU. Medan. (tidak dipublikasikan).
- Lubis, Ade Fatma, Arifin Akhmad, dan Firman Syarif 2007. *Aplikasi SPSS (Statistical Product and Service Soutions) untuk Penyusunan Skripsi dan Tesis*. USU Press. Medan.
- Maimunah, Mutiara. 2006. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. *Simposium Nasional Akuntansi 9 Packing 23-26 Agustus 2006*.

- Ndadari, Laras Wulan dan Priyo Hari Adi. 2008. Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah terhadap Transfer Pemerintah Pusat. *The 2nd National Conference UKWMS Surabaya, 6 September 2008*.
- Nurlina. 2004. Analisis Pengaruh Anggaran Belanja Rutin dan Anggaran Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nanggroe Aceh Darussalam. Tesis S2 Program Pascasarjana USU. Medan. (tidak dipublikasikan).
- Rahmansyah, Armin. 2004. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi - Propinsi di Indonesia. Tesis S2 Program Pascasarjana USU. Medan. (tidak dipublikasikan).
- Ramzuhri. 2008. Pengaruh Pertumbuhan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten di Sumatera Utara. Tesis S2 Program Pascasarjana USU. Medan. (tidak dipublikasikan).
- Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.
- _____. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- _____. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- _____. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Simanjuntak, Robert. 2001. Kebijakan Pungutan Daerah di Era Otonomi, Domestic Trade, Decentralization and Globalization : A One Day Conference, LPEM-UI, Jakarta.
- Sinullingga, Budi D. 2009. Analisis Pengaruh Alokasi Sektor Anggaran Pemerintah Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Kota Medan)
- Solin, Jonni Feber. 2007. Pengaruh Anggaran Sektor Pertanian, Pendidikan, Kesehatan, Transportasi dan Sektor Lainnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dairi. Tesis S2 Program Pascasarjana USU. Medan. (tidak dipublikasikan).
- Walidi. 2009. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Perkapita, Belanja Modal sebagai Intervening Variabel (Studi Kasus di Propinsi Sumatera Utara). Tesis S2 Program Pascasarjana USU. Medan. (tidak dipublikasikan).